

*This work is licensed under*[a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Suara yang Dibungkam dan Pergulatan Identitas dalam Novel Anak Semua Bangsa Karya Pramoedya Ananta Toer : Kajian Poskolonial

*Andi Annisa Septiani¹, Herlina²*Universitas PGRI Pontianak¹, Universitas PGRI Pontianak²andnnisptni23@gmail.com¹, alif.alifah7810@gmail.com²

Kata Kunci :

Pembungkaman suara;
pergulatan identitas; kajian
poskolonial; Anak Semua
Bangsa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembungkaman suara dan pergulatan identitas dalam novel Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer melalui kajian poskolonial. Fokus penelitian diarahkan pada cara sistem kolonial Hindia Belanda membungkam suara pribumi serta membentuk identitas subjek terjajah, khususnya melalui pengalaman tokoh Nyai Ontosoroh dan Minke. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan novel Anak Semua Bangsa sebagai sumber data primer, serta buku teori dan artikel ilmiah sebagai sumber data sekunder. Analisis data dilakukan melalui pembacaan mendalam terhadap teks, identifikasi bentuk pembungkaman suara dan perjuangan identitas, serta interpretasi data menggunakan pemikiran poskolonial Frantz Fanon, Gayatri Chakravorty Spivak, dan konsep double consciousness W.E.B. Du Bois. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembungkaman suara pada novel tidak berlangsung secara langsung, melainkan bekerja melalui struktur hukum, sosial, dan budaya kolonial yang meniadakan legitimasi suara pribumi, terutama perempuan. Selain itu, novel ini merepresentasikan perjuangan identitas tokoh melalui kesadaran kritis, pendidikan, dan tulisan sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi kolonial. Temuan ini menegaskan bahwa Anak Semua Bangsa tidak hanya merekam realitas kolonial, tetapi juga berfungsi sebagai teks kritis yang merefleksikan warisan kolonial dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini.

PENDAHULUAN

Karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan atau ekspresi estetika, tetapi juga sebagai ruang ideologis yang merekam memori, peristiwa sejarah, serta pengalaman manusia menghadapi relasi kuasa dan penindasan (Jamil et al., 2024). Konteks kolonialisme pada sastra kerap berperan sebagai medium representasi dominasi sekaligus perlawanan terhadap hegemoni penjajah, termasuk praktik pembungkaman suara dan perampasan identitas bangsa terjajah (Rosida & Hikam, 2025). Salah satu karya sastra Indonesia yang secara kuat



This work is licensed under

[a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

merepresentasikan realitas tersebut adalah novel *Anak Semua Bangsa* karya Pramoedya Ananta Toer (2006). Novel ini menggambarkan ketidakadilan struktural, diskriminasi rasial, serta pergulatan identitas manusia pribumi di bawah sistem kolonial Hindia Belanda melalui potret sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Pendekatan poskolonial menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami dinamika tersebut karena berfokus pada relasi kuasa antara penjajah dan terjajah serta dampaknya terhadap pembentukan identitas dan kesadaran subjek kolonial (Sobari et al., 2025). Pemikiran Frantz Fanon mengenai *colonization of the mind* menjelaskan bahwa bentuk penjajahan paling berbahaya adalah penjajahan terhadap kesadaran, ketika manusia terjajah menginternalisasi pandangan kolonial dan meyakini inferioritas dirinya dibandingkan bangsa penjajah (Fanon, 1986).

Sejalan dengan itu, konsep subaltern dari Gayatri Chakravorty Spivak menegaskan bahwa kelompok tertindas sering kali tidak diakui suaranya terhadap struktur wacana yang didominasi oleh kekuasaan kolonial dan patriarki. Subaltern bukan tidak mampu berbicara, melainkan tidak diberi ruang untuk menjadi subjek wacana yang sah (Setiawan, 2018). Selain pembungkaman suara, kolonialisme juga melahirkan krisis identitas yang kompleks pada subjek terjajah. Kondisi ini dapat dipahami melalui teori *double consciousness* dari W.E.B. Du Bois (2006), yang menggambarkan identitas yang terbelah akibat tekanan struktur sosial yang menindas. Novel *Anak Semua Bangsa* menunjukkan kedua konsep utama poskolonial, yakni pembungkaman suara (*silenced voices*) dan perjuangan identitas (*identity struggle*), hadir secara kuat melalui tokoh-tokohnya. Pembungkaman suara terlihat dari sistem hukum kolonial dan konstruksi sosial yang meniadakan legitimasi suara pribumi, khususnya perempuan seperti Nyai Ontosoroh. Statusnya sebagai “nyai” dijadikan perangkat kolonial untuk menghapus martabat, otoritas, dan hak berbicara perempuan pribumi, meskipun ia memiliki kecerdasan, kesadaran kritis, dan kemampuan manajerial yang tinggi.

Sementara itu, perjuangan identitas tercermin melalui tokoh Minke sebagai pemuda pribumi terpelajar yang hidup dengan situasi tarik-menarik antara budaya Barat yang dianggap modern dan budaya pribumi yang diposisikan sebagai inferior. Pergulatan Minke menunjukkan bentuk identitas hibrida yang terus bernegosiasi untuk menemukan martabat dan kesadaran diri melalui pendidikan, pengalaman sosial, serta suara kritis. Kedua tokoh tersebut merepresentasikan bagaimana kolonialisme tidak hanya menindas secara struktural, tetapi juga membentuk kesadaran dan identitas subjek terjajah, sekaligus membuka ruang bagi munculnya resistensi.

Penelitian relevan yang digunakan peneliti yaitu Lestari (2020) mengidentifikasi diskriminasi ras dan etnis terhadap tokoh-tokoh pribumi sebagai dampak hierarki kolonial dalam *Anak Semua Bangsa*. Kepakisan dan Aji (2023), melalui perspektif Pierre Bourdieu, menunjukkan bahwa dominasi kolonial dalam novel ini bekerja tidak hanya secara material, tetapi juga melalui kekerasan simbolik seperti bahasa, pendidikan, dan legitimasi budaya. Pendekatan ideologis dan poskolonial digunakan oleh Sivani (2023) untuk mengungkap bagaimana hegemoni kolonial dilegitimasi melalui kebudayaan, ideologi, kaum intelektual, dan negara sehingga ketimpangan sosial diterima sebagai kewajaran. Sementara itu, Assahab et al. (2023) menyoroti diskriminasi kolonial dan nasionalisme dengan menekankan perjuangan tokoh-tokoh dalam menghadapi ketidakadilan hukum dan sosial. Selain itu, Yulindreswari et al. (2025) mengkaji identitas hibrid dan dekonstruksi mitos kolonial dalam *Anak Semua Bangsa*, dengan menekankan peran bahasa dan pendidikan sebagai sarana resistensi kultural.



This work is licensed under

[a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan pada aspek diskriminasi rasial atau kekerasan simbolik pada novel *Anak Semua Bangsa*, penelitian ini secara khusus mengintegrasikan pemikiran Frantz Fanon (1986), Gayatri Chakravorty Spivak (1988), dan W.E.B. Du Bois (2006) untuk membaca pembungkaman suara dan perjuangan identitas sebagai proses struktural sekaligus psikologis. Pemikiran Fanon dalam *Black Skin, White Masks* (1986) dan *The Wretched of the Earth* (1961) menekankan bahwa kolonialisme tidak hanya bekerja melalui kekerasan fisik dan ekonomi, namun juga melalui internalisasi inferioritas yang membentuk kesadaran psikologis subjek terjajah. Perspektif ini relevan dalam memahami konflik batin dan krisis identitas tokoh pribumi dalam relasi kuasa kolonial yang timpang. Sementara itu, konsep subaltern yang dikemukakan Spivak dalam esainya *Can the Subaltern Speak?* (1988) digunakan untuk menelaah pembungkaman suara kelompok terjajah dalam wacana kolonial dan nasional, di mana pengalaman dan kepentingan mereka kerap tereduksi atau diwakilkan oleh elite kolonial maupun pribumi terdidik. Adapun teori *double consciousness* dari Du Bois dalam *The Souls of Black Folk* (2006) memperkuat analisis mengenai kesadaran terbelah subjek terjajah, yang harus memandang dirinya melalui kacamata penjajah sekaligus mempertahankan identitas kulturalnya sendiri. Konsep ini membantu menjelaskan ketegangan identitas dan ambivalensi tokoh-tokoh pribumi dalam novel sebagai dampak langsung dari hegemoni kolonial.

Peneliti tertarik mengangkat masalah pembungkaman suara dan perjuangan identitas dalam novel *Anak Semua Bangsa* karena isu tersebut tidak hanya merepresentasikan realitas kolonial masa lalu, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial yang masih relevan dalam masyarakat Indonesia masa kini. Praktik marjinalisasi suara kelompok tertentu, dominasi wacana oleh elite, serta ketimpangan dalam memperoleh legitimasi sosial dan hukum menunjukkan bahwa relasi kuasa kolonial tidak sepenuhnya berakhir, melainkan bertransformasi dalam konteks pascakolonial (Saifur, 2024). Selain itu, novel *Anak Semua Bangsa* menarik untuk dikaji karena menghadirkan tokoh-tokoh pribumi yang mengalami tekanan kolonial tidak hanya secara struktural, tetapi juga secara psikologis, terutama dalam pembentukan kesadaran dan identitas diri. Fenomena ini relevan dengan kajian poskolonial yang menekankan bahwa kolonialisme bekerja melalui mekanisme diskursif dan internalisasi inferioritas (Hilal et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperkaya kajian sastra poskolonial Indonesia dengan pembacaan yang mengaitkan pembungkaman suara dan perjuangan identitas sebagai proses kolonial yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana bentuk pembungkaman suara (*silenced voices*) direpresentasikan oleh novel *Anak Semua Bangsa*, bagaimana tokoh-tokoh dalam novel membangun resistensi dan memperjuangkan identitas mereka di tengah tekanan kolonial, serta sejauh mana novel ini merefleksikan realitas kolonial dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Sejalan dengan rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kolonialisme dan pembungkaman suara yang ditampilkan novel *Anak Semua Bangsa*, menganalisis perjuangan tokoh-tokoh yang berupaya membangun kesadaran dan identitas melalui perspektif poskolonial, serta mengungkap relevansi pemikiran poskolonial terhadap kondisi sosial, pendidikan, hukum, dan mentalitas bangsa Indonesia saat ini.



This work is licensed under

[a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis teks sastra. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji representasi pembungkaman suara dan pergulatan identitas pada novel *Anak Semua Bangsa* karya Pramoedya Ananta Toer melalui kerangka kajian poskolonial. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan penelusuran dan pengkajian mendalam terhadap teks sastra serta sumber-sumber teoretis yang relevan dengan fokus penelitian (Mahanum, 2021). Sumber data primer yang digunakan penelitian ini adalah novel *Anak Semua Bangsa* karya Pramoedya Ananta Toer. Sementara itu, sumber data sekunder berupa buku teori, artikel ilmiah, dan jurnal akademik yang membahas kajian poskolonial, khususnya pemikiran Frantz Fanon, Gayatri Chakravorty Spivak, dan W.E.B. Du Bois, digunakan untuk memperkuat landasan konseptual serta mendukung proses interpretasi data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap teks novel dan sumber pendukung, disertai dengan teknik dokumentasi untuk mencatat kutipan narasi, dialog, dan peristiwa yang merepresentasikan pembungkaman suara, relasi kuasa kolonial, serta perjuangan identitas tokoh. Unit analisis penelitian ini meliputi dialog, narasi, dan tindakan tokoh yang menunjukkan mekanisme kolonialisme dan respons subjek terjajah terhadap struktur kekuasaan kolonial. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu pemilahan data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data secara deskriptif-analitis, serta interpretasi data menggunakan konsep-konsep utama kajian poskolonial, seperti *colonization of the mind*, subaltern, dan *double consciousness*. Tahap akhir analisis dilakukan dengan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini memaparkan temuan penelitian berdasarkan analisis terhadap novel *Anak Semua Bangsa* karya Pramoedya Ananta Toer dengan menggunakan pendekatan kajian poskolonial. Pembahasan diarahkan untuk mengungkap cara kerja kolonialisme membentuk relasi kuasa yang menghasilkan praktik pembungkaman suara serta pergulatan identitas subjek terjajah. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data tekstual berupa narasi dan dialog tokoh dengan konsep-konsep poskolonial yang relevan, sehingga pembahasan tidak hanya berhenti pada pemaparan temuan, tetapi juga pada penafsiran kritis terhadap makna ideologis yang terkandung pada teks. Dengan demikian, bagian ini menjadi landasan untuk memahami secara sistematis representasi pembungkaman suara dan perjuangan identitas yang akan dibahas pada subbagian berikutnya.

(1) PEMBUNGKAMAN SUARA (SILENCED VOICES)

Pembungkaman suara (*silenced voices*) dalam novel *Anak Semua Bangsa* bekerja bukan melalui larangan berbicara secara langsung, melainkan melalui mekanisme struktural yang dilembagakan oleh sistem kolonial. Kolonialisme Hindia Belanda membangun tatanan hukum, sosial, dan budaya yang menentukan siapa yang berhak berbicara dan siapa yang harus disenyapkan. Struktur ini menjelaskan bahwa, bangsa Eropa diposisikan sebagai subjek kolonial



yang sah, sementara bangsa pribumi ditempatkan sebagai objek yang suaranya tidak memiliki legitimasi kebenaran

Fenomena tersebut selaras dengan pemikiran Gayatri Chakravorty Spivak tentang *subaltern*, yakni kelompok tertindas tersebut bukan tidak mampu berbicara, tetapi tidak diakui sebagai subjek wacana yang sah (Suryati, 2021). Subaltern dibungkam bukan melalui keheningan biologis, melainkan melalui sistem representasi yang meniadakan otoritas suara mereka. Representasi konkret dari kondisi subaltern tersebut tampak jelas pada tokoh Nyai Ontosoroh. Statusnya sebagai “nyai” membuat keberadaannya tidak diakui berdasarkan hukum kolonial, meskipun ia memiliki kecerdasan, kesadaran kritis, dan kemampuan manajerial yang tinggi. Nyai Ontosoroh secara sadar menyadari posisinya ketika menyatakan bahwa

“Seluruh dunia kekuasaan memuji-muji yang kolonial. Yang tidak kolonial dianggap tak punya hak hidup, termasuk mamamu ini.”

Pernyataan Nyai Ontosoroh mengungkap secara jelas bagaimana kolonialisme membangun tatanan nilai yang menyingkirkan kemanusiaan pribumi. Kutipan ini menunjukkan bahwa pengakuan sosial dan politik tidak diberikan berdasarkan kapasitas berpikir, moralitas, atau pengalaman hidup seseorang, melainkan ditentukan oleh kedekatannya dengan struktur kolonial. Dalam sistem semacam ini, keberadaan manusia pribumi diposisikan sebagai tidak sah, tidak penting, dan mudah dihapuskan dari ruang keadilan. Dengan kata lain, pembungkaman suara Nyai Ontosoroh bukanlah peristiwa individual, melainkan konsekuensi langsung dari sistem kolonial yang mengatur siapa yang layak hidup, berbicara, dan diakui.

Dilihat melalui pandangan Gayatri Chakravorty Spivak, posisi Nyai Ontosoroh merepresentasikan kondisi subaltern. Ia memiliki kesadaran kritis, mampu mengartikulasikan ketidakadilan yang dialaminya, dan memahami mekanisme penindasan yang bekerja atas dirinya. Namun, meskipun ia berbicara, suaranya tidak pernah memperoleh pengakuan sebagai kebenaran yang sah dalam struktur hukum dan sosial kolonial. Hukum kolonial tidak menyediakan ruang bagi suara perempuan pribumi untuk diakui, sehingga apa pun yang ia katakan akan selalu dianggap tidak bernilai. Kondisi inilah yang menjadikan pembungkaman bukan sekadar soal tidak bisa berbicara, melainkan tentang tidak diakuinya suara sebagai pengetahuan dan kebenaran.

Pembungkaman tersebut semakin dipertegas melalui praktik hukum kolonial yang berfungsi sebagai alat pelestarian kekuasaan, bukan sebagai mekanisme keadilan. Penahanan terhadap Nyai Ontosoroh dan Minke dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, menunjukkan bahwa hukum kolonial bersifat selektif dan diskriminatif. Ketidakadilan ini disadari sepenuhnya oleh Nyai Ontosoroh, yang secara kritis menyingkap logika kekuasaan kolonial ketika ia menyatakan

“Memang mereka membutuhkan ketakutan kita, Nak, biar kita diam saja, bagaimana pun pribumi diperlakukan.”

Pernyataan ini dapat dibaca melalui pemikiran Frantz Fanon tentang kolonialisme sebagai sistem dehumanisasi. Fanon menegaskan bahwa kolonialisme tidak hanya menindas secara fisik, tetapi juga menanamkan ketakutan dan inferioritas kesadaran subjek terjajah. Ketakutan tersebut berfungsi sebagai alat pembungkaman psikologis yang membuat manusia terjajah



This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Pembungkaman suara pada novel *Anak Semua Bangsa* juga direpresentasikan sebagai pengalaman kolektif masyarakat pribumi. Nyai Ontosoroh menggambarkan penderitaan jutaan manusia yang dipaksa diam tanpa ruang artikulasi. Ia menyatakan,

“Berjuta-juta umat manusia menderitakan tingkahnya dengan diam-diam seperti batu kali.”

Kesenyapan ini bukanlah bentuk kepasrahan, melainkan hasil dari struktur kolonial yang menyingkirkan pengalaman pribumi dari ruang wacana. Kondisi ini menegaskan bahwa subaltern memang “tidak dapat didengar”, bukan karena tidak berbicara, tetapi karena sistem kolonial menutup kemungkinan suara mereka diakui sebagai kebenaran, hal ini sesuai dengan teori Spivak. Meskipun demikian, novel ini juga menunjukkan adanya upaya melawan pembungkaman suara melalui medium alternatif. Nyai Ontosoroh menekankan pentingnya tulisan sebagai sarana perlawanan terhadap represi kolonial. Ia menyatakan kepada Minke,

“Tapi kau, Nak, paling sedikit harus bisa berteriak... Karena kau menulis. Suaraku takkan padam ditelan angin.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tulisan berfungsi sebagai ruang resistensi terhadap pembungkaman struktural. Sesuai dengan teori Frantz Fanon, tindakan menulis dan berbicara secara kritis merupakan bagian dari proses *decolonization of the mind*, yaitu usaha subjek terjajah untuk merebut kembali kesadaran, martabat, dan kemanusiaannya. Sastra, dalam konteks ini, menjadi arena perlawanan ideologis terhadap dominasi kolonial. Dengan demikian, pembungkaman suara dalam *Anak Semua Bangsa* tidak dapat dipahami sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai mekanisme kolonial yang bersifat struktural, sistemik, dan psikologis. Melalui tokoh Nyai Ontosoroh, Pramoedya Ananta Toer memperlihatkan bagaimana subaltern dibungkam oleh hukum, budaya, dan ketakutan yang dilembagakan, sekaligus membuka kemungkinan perlawanan melalui kesadaran dan produksi wacana. Novel ini menegaskan bahwa kolonialisme merampas bukan hanya tanah dan tenaga, tetapi juga hak berbicara dan hak menjadi subjek sejarah.

(2) RESISTENSI DAN PERJUANGAN IDENTITAS TOKOH

Selain merepresentasikan praktik pembungkaman suara, novel *Anak Semua Bangsa* juga menampilkan berbagai bentuk resistensi dan perjuangan identitas yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pribumi. Resistensi dalam novel ini tidak diwujudkan terutama melalui perlawanan fisik terhadap kekuasaan kolonial, melainkan melalui kesadaran kritis, penolakan terhadap inferioritas, serta usaha merebut kembali martabat dan identitas diri. Dilihat dari sudut pandang kajian poskolonial, bentuk resistensi semacam ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak pernah sepenuhnya berhasil menaklukkan kesadaran subjek terjajah, meskipun secara struktural mereka ditempatkan dalam posisi subordinat (Tampilang, 2025). Tokoh Nyai Ontosoroh merepresentasikan resistensi yang berangkat dari kesadaran diri dan keteguhan prinsip. Meskipun secara hukum ia tidak diakui sebagai subjek kolonial yang sah, Nyai Ontosoroh menolak memandang dirinya sebagai manusia rendah. Ia membangun identitasnya melalui pengetahuan dan rasionalitas, bukan melalui pengakuan kolonial. Hal ini tampak ketika ia menasihati Minke agar tidak terpesona oleh simbol dan nama besar kolonial semata. Ia



This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mengatakan bahwa,

“Jangan kau mudah terpesona oleh nama-nama... Eropa tidak berhebat-hebat dengan nama, dia berhebat dengan ilmu dan pengetahuannya.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa Nyai Ontosoroh secara sadar menolak logika kolonial yang mengukur martabat manusia berdasarkan ras, gelar, dan status sosial. Sikap tersebut merupakan bentuk resistensi terhadap *colonization of the mind* oleh Frantz Fanon, yakni upaya membebaskan kesadaran dari rasa inferior yang ditanamkan oleh kolonialisme. Dengan menempatkan pengetahuan dan rasionalitas sebagai dasar identitas, Nyai Ontosoroh merebut kembali kemanusiaannya sebagai subjek yang berpikir merdeka. Dalam relasinya dengan Minke, Nyai Ontosoroh berperan sebagai figur pendidik ideologis yang menanamkan keberanian berpikir kritis dan kesetiaan pada prinsip keadilan. Ia menegaskan bahwa ketidakadilan harus dilawan, sekecil apa pun bentuknya, karena pembiaran hanya akan melanggengkan penindasan. Sikap ini menunjukkan bahwa resistensi tidak selalu membutuhkan pengakuan hukum, melainkan dapat tumbuh dari kesadaran personal yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Perjuangan identitas juga tampak secara kompleks melalui tokoh Minke. Sebagai pemuda pribumi yang memperoleh pendidikan Barat, Minke mengalami konflik batin yang mencerminkan teori *double consciousness* dari W.E.B. Du Bois (2006). Minke hidup dalam dua dunia yang saling bertentangan: dunia kolonial yang menawarkan modernitas dan kemajuan, serta dunia pribumi yang diposisikan sebagai inferior. Pergulatan identitas Minke dalam *Anak Semua Bangsa* tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari pengalaman langsung menyaksikan ketidakadilan kolonial yang sistematis terhadap kaum pribumi. Pendidikan Barat yang ia terima pada awalnya membuat Minke mengagumi rasionalitas dan kemajuan Eropa. Namun, kekaguman tersebut perlahan runtuh ketika ia berhadapan dengan realitas sosial bangsanya sendiri yang terus-menerus diposisikan sebagai objek penindasan. Minke menyadari bahwa modernitas kolonial berjalan beriringan dengan eksploitasi, perampasan hak, dan penghapusan martabat manusia pribumi. Kesadaran inilah yang menjadi titik awal perubahan cara pandangya terhadap kolonialisme.

Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat kecil, menyaksikan praktik hukum yang timpang, serta melihat bagaimana suara pribumi tidak memiliki nilai dalam sistem kolonial membuat Minke mulai mempertanyakan keadilan yang selama ini ia yakini bersumber dari Eropa. Ia menyadari bahwa kolonialisme tidak hanya menguasai wilayah dan sumber daya, tetapi juga membentuk cara berpikir dan hierarki nilai yang menempatkan pribumi sebagai manusia kelas dua. Dari titik inilah kesadaran Minke berkembang menuju pemahaman bahwa penindasan kolonial bekerja secara struktural dan ideologis, bukan sekadar melalui kekerasan fisik. Kesadaran tersebut kemudian memunculkan pergeseran cara pandang Minke terhadap pengetahuan dan modernitas. Ia menolak anggapan bahwa kemajuan hanya dimiliki oleh bangsa Eropa, sebagaimana diungkapkannya,

“Dan bukan hanya Eropa! Zaman modern ini telah menyampaikan padaku buah dada untuk menyusui aku, dari Pribumi sendiri, dari Jepang, Tiongkok, Amerika, India, Arab, dari semua bangsa di muka bumi ini.”



This work is licensed under

[a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kutipan ini menunjukkan pergeseran kesadaran Minke dari pandangan Eropa-sentris menuju kesadaran yang lebih luas dan inklusif. Pergulatan identitas Minke semakin dalam ketika ia merefleksikan posisinya sebagai pribumi dalam sistem kolonial melalui pertanyaan tentang nama dan makna diri, *“What is in a name? Apa arti sebuah nama? Orang memanggil aku Minke.”* Refleksi ini menunjukkan kesadarannya bahwa identitas pribumi dibentuk dan dibatasi oleh konstruksi simbolik kolonial. Nama tidak sekadar penanda individual, tetapi menjadi bagian dari mekanisme sosial yang menentukan posisi seseorang dalam relasi kuasa. Dengan mempertanyakan makna nama, Minke mulai menyadari bahwa identitas yang dilekatkan kepadanya merupakan produk sistem kolonial yang menindas dan karena itu perlu digugat.

Kesadaran akan penindasan struktural tersebut mendorong Minke untuk menempuh pembebasan batin yang lebih mendalam. Ia tidak berhenti pada kritik terhadap kolonialisme sebagai sistem kekuasaan yang menindas dari luar, tetapi juga merefleksikan bagaimana sistem tersebut membentuk cara berpikir dan menanamkan rasa inferior dalam diri pribumi. Minke mulai menyadari bahwa kolonialisme bekerja secara halus melalui pembiasaan mental, yakni dengan membuat kaum terjajah meragukan nilai dirinya sendiri. Oleh karena itu, pembebasan yang ia jalani tidak hanya berkaitan dengan penolakan terhadap ketidakadilan sosial, melainkan juga merupakan upaya membongkar ketergantungan psikologis dan kelemahan batin yang lahir dari dominasi kolonial. Proses pembebasan batin ini tercermin ketika Minke memaknai pengalaman yang ia lalui sebagai sebuah kemenangan personal. Ia menyatakan,

“Lebih dari itu: aku telah mampu mengatasi kelemahan hati sendiri, mengatasi sentimen yang tidak pada tempatnya... dan aku nilai ini sebagai suatu kemenangan pribadi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Minke mulai menguasai dirinya sendiri, tidak lagi dikuasai oleh emosi, prasangka, maupun kekaguman berlebihan terhadap nilai-nilai kolonial. Kemenangan yang dimaksud bukanlah kemenangan atas penjajah secara langsung, melainkan kemenangan dalam menata kesadaran dan sikap hidupnya. Kemenangan batin ini menjadi tahap penting dalam perjuangan identitas Minke. Pada titik ini, ia mulai memosisikan dirinya sebagai pribadi yang sadar dan kritis, serta tidak lagi sepenuhnya terikat pada cara pandang kolonial. Dengan melepaskan nilai-nilai inferioritas yang selama ini terinternalisasi, Minke perlahan membangun pandangan hidup yang lebih mandiri dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta kemanusiaan. Perkembangan ini menandai bahwa perjuangan melawan kolonialisme tidak hanya berlangsung di ranah sosial dan politik, tetapi juga di tingkat kesadaran, tempat martabat dan kepercayaan diri manusia dipulihkan.

Kerangka pemikiran Du Bois membantu memahami pergeseran yang dialami Minke sebagai proses negosiasi identitas dari kesadaran yang terbelah menuju kesadaran kritis yang tidak lagi sepenuhnya tunduk pada sudut pandang penjajah. Pengalaman hidup di antara dunia pendidikan Barat dan realitas penindasan terhadap pribumi mendorong Minke untuk meninjau ulang nilai-nilai yang selama ini ia anggap mapan. Kesadaran tersebut kemudian berkembang menjadi bentuk resistensi yang tidak bersifat konfrontatif secara fisik, melainkan diwujudkan melalui pemikiran dan tulisan.

Menulis menjadi medium penting bagi Minke untuk mengekspresikan kesadaran kritis tersebut. Melalui tulisan, ia berusaha menyuarakan ketidakadilan yang dialami bangsanya sekaligus menegaskan posisi berpikir yang tidak lagi bergantung pada legitimasi kolonial. Perspektif poskolonial memandang produksi wacana sebagai strategi yang signifikan karena kolonialisme

*This work is licensed under*[a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

tidak hanya bekerja melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui penguasaan pengetahuan, bahasa, dan representasi. Oleh karena itu, aktivitas menulis dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan ideologis yang menantang dominasi kolonial pada tingkat pemaknaan dan cara pandang.

Melalui tulisan, Minke tidak sekadar melawan pembungkaman suara, tetapi juga membangun kembali identitas dirinya sebagai bagian dari komunitas bangsa-bangsa tertindas yang memiliki sejarah, pengalaman kolektif, dan martabat kemanusiaan. Tulisan menjadi sarana untuk merebut kembali hak berbicara yang selama ini disingkirkan oleh sistem kolonial, sekaligus alat untuk menghubungkan pengalaman pribumi dengan perjuangan yang lebih luas melampaui batas geografis dan rasial. Lebih jauh, perjuangan identitas Minke dapat dipahami sebagai proses negosiasi menuju identitas hibrida. Ia tidak sepenuhnya menolak pendidikan Barat yang telah membentuk kapasitas intelektualnya, tetapi juga tidak lagi menerima nilai-nilai kolonial secara utuh dan tanpa kritik. Identitas hibrida ini mencerminkan upaya Minke untuk memadukan pengetahuan modern dengan kesadaran nasional serta keberpihakan terhadap kaum tertindas.

Kerangka poskolonial menunjukkan bahwa identitas semacam ini lahir dari proses aktif dalam membangun makna diri di tengah tekanan dan dominasi kolonial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa resistensi dan perjuangan identitas dalam *Anak Semua Bangsa* berlangsung melalui kesadaran kritis, pendidikan, dan produksi wacana. Pramoedya Ananta Toer menegaskan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan juga melalui keberanian berpikir mandiri dan menulis sebagai fondasi pembebasan kesadaran serta pemulihan martabat kemanusiaan.

(3) REFLEKTISITAS REALITAS KOLONIAL DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT INDONESIA MASA KINI

Novel *Anak Semua Bangsa* tidak hanya merekam realitas kolonial pada awal abad ke-20, tetapi juga menghadirkan refleksi kritis terhadap warisan kolonial yang terus berjejak dalam kehidupan masyarakat pascakolonial. Pramoedya Ananta Toer memposisikan kolonialisme bukan semata sebagai peristiwa historis yang telah berlalu, melainkan sebagai sistem kekuasaan yang meninggalkan dampak jangka panjang dalam cara berpikir, struktur sosial, dan relasi kuasa masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Frantz Fanon yang menegaskan bahwa kolonialisme tidak benar-benar berakhir selama kesadaran dan struktur yang dibentuknya masih bertahan dalam kehidupan masyarakat terjajah. Salah satu warisan kolonial yang paling mendasar adalah terbentuknya mentalitas terjajah, yaitu kondisi pribumi memandang dirinya sebagai pihak yang inferior, tidak berdaya, dan bergantung pada otoritas penjajah (Aftariansyah et al., 2025). Pada novel *Anak Semua Bangsa*, mentalitas ini tampak pada cara sebagian tokoh pribumi memandang kemajuan dan peradaban Barat sebagai tolok ukur superioritas.

Tokoh Minke pada tahap awal merepresentasikan subjek terjajah yang telah menginternalisasi nilai-nilai kolonial melalui pendidikan Barat. Pendidikan tersebut tidak hanya membekali Minke dengan pengetahuan modern, tetapi juga membentuk cara pandang yang secara tidak sadar menempatkan budaya dan ras Eropa sebagai tolok ukur superioritas. Pengalaman Minke menunjukkan bahwa kolonialisme tidak semata-mata beroperasi melalui dominasi politik dan



This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

militer, melainkan juga melalui pembentukan kesadaran psikologis yang menundukkan subjek terjajah dari dalam. Dalam konteks ini, penjajahan tetap bekerja bahkan ketika kekuasaan kolonial secara formal mulai melemah, karena mentalitas terjajah telah mengakar dalam cara berpikir individu.

Refleksi tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konteks masyarakat Indonesia masa kini. Kecenderungan menjadikan budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai Barat sebagai standar utama, sementara identitas serta kearifan lokal diposisikan sebagai sesuatu yang sekunder atau kurang modern, dapat dibaca sebagai kelanjutan dari mentalitas kolonial yang belum sepenuhnya terurai. Situasi ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak sepenuhnya berakhir pada level struktural, tetapi masih bertahan dalam ranah kultural dan ideologis.

Dalam bidang hukum dan keadilan sosial, pengalaman kolonial yang digambarkan dalam *Anak Semua Bangsa* memperlihatkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang secara sistematis menyingkirkan suara kelompok marginal, khususnya pribumi dan perempuan. Hukum kolonial tidak dirancang untuk menjamin keadilan universal, melainkan untuk mempertahankan dominasi kolonial melalui pengaturan sosial yang hierarkis. Dalam konteks Indonesia, warisan hukum kolonial tersebut tidak sepenuhnya hilang setelah kemerdekaan, melainkan masih dapat ditelusuri dalam praktik hukum dan kebijakan yang kerap kurang berpihak pada kelompok rentan, seperti masyarakat adat, perempuan, dan kelompok ekonomi lemah. Ketimpangan akses terhadap keadilan, bias struktural dalam penegakan hukum, serta dominasi kepentingan elite mencerminkan keberlanjutan logika hukum kolonial yang menempatkan sebagian kelompok sebagai subjek penuh hukum, sementara kelompok lainnya diperlakukan secara subordinatif.

Gagasan Fanon mengenai pendidikan sebagai sarana internalisasi nilai penjajah masih memiliki relevansi yang kuat bagi realitas Indonesia masa kini. Sistem pendidikan modern kerap menempatkan pengetahuan Barat sebagai rujukan utama, sementara sejarah, bahasa, dan kearifan lokal sering diposisikan sebagai unsur pelengkap yang kurang memiliki otoritas. Pola tersebut berpotensi melahirkan generasi terdidik yang unggul secara akademik, namun terputus dari akar sosial dan pengalaman historis bangsanya sendiri. Kondisi ini sejalan dengan pengalaman Minke yang menunjukkan bahwa pendidikan tanpa kesadaran kritis dapat membentuk subjek yang cakap secara intelektual, tetapi tetap terkungkung dalam cara berpikir kolonial. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat berfungsi sebagai sarana pembebasan apabila diarahkan untuk menumbuhkan daya reflektif, keberpihakan pada keadilan sosial, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya dan identitas. Namun, internalisasi nilai kolonial tidak hanya berlangsung melalui institusi pendidikan, melainkan juga bekerja dalam ranah sosial yang lebih luas melalui pengaturan wacana dan relasi kuasa.

Pembungkaman suara kelompok marginal yang digambarkan dalam *Anak Semua Bangsa* menemukan pantulannya dalam kehidupan sosial Indonesia saat ini. Dalam berbagai ruang publik, baik politik, hukum, maupun media, kelompok tertentu seperti masyarakat adat, perempuan, dan lapisan ekonomi bawah masih sering mengalami pengabaian atau delegitimasi suara. Penyingkiran tersebut tidak selalu berlangsung melalui kekerasan terbuka, melainkan bekerja secara simbolik melalui penguasaan wacana yang menentukan siapa yang dianggap layak berbicara dan siapa yang diposisikan di luar ranah legitimasi. Sejalan dengan pemikiran Fanon, praktik semacam ini menunjukkan bahwa penindasan modern bekerja melalui kontrol



atas makna dan otoritas pengetahuan. Dengan demikian, pembebasan tidak cukup ditempuh melalui perubahan struktural semata, tetapi juga menuntut transformasi cara pandang terhadap relasi kuasa, representasi, dan hak bersuara dalam kehidupan bersama.

Berangkat dari pembacaan tersebut, *Anak Semua Bangsa* dapat dipahami sebagai karya sastra yang tidak hanya merepresentasikan pengalaman kolonial masa lalu, tetapi juga merefleksikan dinamika pascakolonial Indonesia. Melalui narasi tentang pendidikan, hukum, dan pembungkaman suara kelompok marginal, Pramoedya Ananta Toer menegaskan bahwa pembebasan tidak cukup dicapai melalui kemerdekaan politik, melainkan menuntut pembongkaran cara berpikir kolonial serta transformasi struktur sosial yang mereproduksi ketimpangan. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Rahariyoso (2023) yang menegaskan bahwa sastra dalam perspektif pascakolonial berfungsi sebagai medium kritik kebudayaan untuk menyingkap keberlanjutan kesadaran kolonial dalam pembentukan identitas dan relasi kuasa masyarakat Indonesia kontemporer. Sastra tidak hanya merekam jejak kolonialisme historis, tetapi juga mengungkap bagaimana dominasi wacana dan struktur budaya kolonial masih bekerja dalam kehidupan sosial pascakolonial. Sejalan dengan itu, penelitian Aftariansyah et al., (2025) menunjukkan bahwa konstruktivisme budaya kolonial Belanda melalui sistem pendidikan, klasifikasi sosial “pribumi” dan “non-pribumi”, serta struktur hukum dan birokrasi masih membentuk tipologi identitas dan relasi kuasa masyarakat Indonesia pascakolonial. Temuan tersebut menegaskan bahwa warisan kolonial tidak hanya bertahan pada tataran struktural, tetapi juga terinternalisasi dalam cara berpikir, identitas, dan posisi sosial masyarakat Indonesia hingga masa kini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa novel *Anak Semua Bangsa* karya Pramoedya Ananta Toer merepresentasikan kolonialisme sebagai sistem penindasan yang bekerja secara struktural, sistemik, dan psikologis. Pembungkaman suara dalam novel ini tidak ditampilkan sebagai larangan berbicara secara langsung, melainkan beroperasi melalui tatanan hukum, sosial, dan budaya kolonial yang meniadakan legitimasi suara pribumi. Melalui tokoh Nyai Ontosoroh, pembungkaman tersebut tampak sebagai pengalaman subaltern, di mana suara perempuan pribumi tidak diakui sebagai kebenaran yang sah meskipun disertai kecerdasan, kesadaran kritis, dan kapasitas rasional. Selain pembungkaman suara, novel ini juga merepresentasikan resistensi dan perjuangan identitas sebagai respons terhadap dominasi kolonial. Resistensi tidak diwujudkan dalam bentuk perlawanan fisik, melainkan melalui kesadaran kritis, penolakan terhadap inferioritas, serta produksi wacana. Nyai Ontosoroh merepresentasikan perlawanan ideologis melalui pembebasan kesadaran dari logika kolonial, sementara tokoh Minke menggambarkan pergulatan identitas yang kompleks sebagaimana konsep *double consciousness*. Proses negosiasi identitas yang dialami Minke menunjukkan bahwa subjek terjajah tidak bersifat pasif, melainkan aktif membangun makna diri di tengah tekanan kolonial melalui pendidikan dan tulisan.

Lebih jauh, *Anak Semua Bangsa* tidak hanya merekam realitas kolonial masa lalu, tetapi juga menawarkan refleksi kritis terhadap kondisi pascakolonial Indonesia masa kini. Warisan kolonial berupa mentalitas terjajah, ketimpangan hukum, serta sistem pendidikan yang berpotensi mereproduksi dominasi nilai penjajah menunjukkan bahwa kolonialisme tidak



This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sepenuhnya berakhir dengan kemerdekaan politik. Dengan demikian, novel ini menegaskan bahwa pembebasan sejati menuntut pembebasan kesadaran, keberanian bersuara, dan transformasi struktur sosial. Melalui perspektif poskolonial, *Anak Semua Bangsa* dapat dipahami sebagai teks sastra yang berfungsi sebagai medium kritik kolonial sekaligus refleksi atas perjuangan kemanusiaan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Aftariansyah, M. D., Hanifa, S., & Aepudin, S. (2025). Pengaruh Doktrin Konstruktivisme Budaya Bangsa Belanda Sebagai Negara Kolonialisme Terhadap Tipologi Bangsa Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 50, 109–123. <http://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2654>
- Assahab, A., Erawati, M., & Junaidi, J. K. (2023). Gambaran Nasionalisme Pada Awal Kebangkitan Nasional Dalam Novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa Karya Pramoedya Ananta Toer. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 3(2), 21–32. <https://doi.org/10.22437/jejak.v3i2.24874>
- Du Bois, W. E. . (2006). *The Souls of Black Folk* (J. Manis (ed.)). Pennsylvania State University.
- Fanon, F. (1961). *The Wretched Of The Earth* (Issue 65). NY: Grove Press.
- Fanon, F. (1986). *Black Skin, White Masks*. Pluto Press.
- Hilal, I., Anantama, M., & Munaris. (2023). *Poskolonial: hibriditas* (R. A. Prasetya (ed.); 1st ed.). Selat Media Patners.
- Jamil, M., Rizal, M. A. S., & Kholik. (2024). Relevansi Ideologi dan Estetika dalam Karya Sastra Pada Puisi Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). *Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7537–7546. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14021>
- Kepakisan, N. K. A. C., & Aji, G. F. S. (2023). Struktur Kekuasaan & Kekerasan Simbolik Dalam Anak Semua Bangsa Karya Pramoedya: Perspektif Bourdieu. *Jurnal Ilmiah Bina Bahasa*, 11–21. <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/binabahasa/article/download/1993/1178>
- Lestari, T. G., Mulyati, S., & Sari, V. I. (2020). Diskriminasi Dalam Novel Anak Semua Bangsa Karya Pramoedya Ananta Toer dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. *Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, 11(2), 139–146. <https://doi.org/10.46650/wa.11.2.893.139-146>
- Mahanum. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal Of Education*, 1(2), 1–12. <https://lppipublishing.com/index.php/alacrity/article/view/20>
- Rosida, S., & Hikam, A. I. (2025). Analisis Psikoanalisis Sastra Terhadap Trauma dan Ingatan Kolektif. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 3, 64–88. <https://journal.aspirasi.or.id/index.php/morfologi/article/view/1880>
- Saifur, R. (2024). Sastra Rempah Abad ke-19: Kajian Gastrokritik pada The History of Java dan Relevansinya dalam Wacana Kolonial dan Pascakolonial dalam Sastra Indonesia. *Journal of Literature and Education*, 2(1), 39–48. <https://jurnal.hiskikaltim.org/index.php/jle/article/view/1>
- Setiawan, R. (2018). Subaltern , Politik Etis , dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika : Jurnal Ilmu Sastra*, 6(1), 13–25. <https://doi.org/10.22146/poetika.35013>
- Sivani, A. R. (2023). Hegemoni Dalam Novel Anak Semua Bangsa Karya Pramoedya Ananta



This work is licensed under

[a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

- Toer: Kajian Hegemoni Antonio Gramsci. *Jurnal SAPALA*, 10(3).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/54748>
- Sobari, I. A., Niampe, L., Rasiah, & Aso, L. (2025). Citra Stereotipikal Orang Pribumi Pada Novel Jejak Langkah Karya Pramoedya Ananta Toer: Kajian Pascakolonial. *Jurnal Penelitian Budaya*, 10(1), 54–76.
<https://journal.uho.ac.id/index.php/JPeB/article/view/1421>
- Spivak, G. C. (1988). *Can the Subaltern Speak?* (pp. 271–313). IL: University of Illinois Press.
- Suryati, I. (2021). Third World Subaltern Women in the Review of Feminism Theory Postcolonial Gayatri Chakravorty Spivak. *Journal of Social Studies*, 2(2), 88–96.
<https://www.academia.edu/download/78335830/251.pdf>
- Tampilang, R. (2025). Pendekatan Poskolonial Terhadap Dekolonialisasi Teologi Melalui Analisis Tiga Dimensi Teologis. *Jurnal Teologi*, 2(2), 90–106. <https://jurnal.stt-rai.ac.id/index.php/rai/article/view/76>
- Toer, P. A. (2006). *Anak Semua Bangsa* (1st ed.). Lentera Dipantara.
- Yulindreswari, M. E., Iskarna, T., & Aji, g. F. S. (2025). Hybrid Identity and the Deconstruction of Colonial Myth In Toer's Novels Bumi Manusia and Anak Semua Bangsa. *International Journal of Literature Studies*, 5(5), 1–9. <https://doi.org/10.32996/ijts>